



Judul : Novanto memalukan
Tanggal : Kamis, 16 November 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 1-7

Novanto Memalukan

TERLEPAS dari insiden kecelakaan, Setya Novanto dianggap telah mempermalukan lembaga yang dipimpinnya sendiri, yakni DPR RI. Pasalnya, ia tidak kooperatif hingga akhirnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). "Tidak ada pilihan bagi kami anggota DPR, kalau perlu gentlemen dia mundur karena mempermalukan DPR," ungkap Desmon J Mahesa kepada wartawan saat dihubungi, Kamis (16/11).

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu, seharusnya sebagai pemimpin lembaga tinggi memberikan contoh yang baik. Apabila memang ada hal yang ganjil pada KPK harus dihadapi, jangan malah menghilang. Itu menambah opini buruk masyarakat terhadap lembaga DPR dan Novanto sendiri. "Kalau memang tidak benar apa yang disangkakan KPK, ya harus dibuktikan dan dihadapi sesuai aturan hukum yang berlaku. Dengan sikapnya ini sama saja mencederai hukum," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Terpisah, Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Irma Suryani Chaniago mengatakan, untuk meminta mundur atau tidaknya Setnov sebagai ketua DPR RI, sangat tergantung pada MKD.

"Keputusannya ada di MKD. Kita punya Mahkamah Dewan, mereka yang ambil keputusan. Bagaimana MKD itu menghormati dirinya sendiri, menghormati lembaga ini, tegantung bagaimana mereka mengambil keputusan," ujarnya kepada wartawan di Komplek parlemen, Senayan.

Disinggung tidak responsifnya anggota DPR terhadap kasus Setnov yang telah dua kali menjadi tersangka tapi tetap dipertahankan sebagai ketua DPR RI, Irma menyatakan, sudah seharusnya yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan tersebut ■

► **Baca Novanto...Hal 7**

Setnov Memalukan

Sambungan dari hal 1

"Setnov harus ikuti proses hukum yang berlaku, sehingga masyarakat bisa menilai. Kalau memang Setnov tidak bersalah, kembalikan lagi (sebagai Ketua DPR, red). Sekarang berhentikan sementara. Kalau bersalah, ya, apa boleh buat, harus dipertanggungjawabkan," papar anggota Komisi IX DPR RI itu.

Begitupula politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto. Sekretaris fraksi partai berlambang matahari itu mengatakan, Setnov seharusnya menghargai proses hukum. Oleh karena itu Setnov sebaiknya hadir dalam pemeriksaan KPK. "Tidak perlu banyak alasan menunggu presiden atau hak imunitas. Saya kira itu kurang pas dan yang saya khawatir justru akan

mencederai lembaga DPR," kata.

Yandri berpendapat, pemeriksaan Novanto oleh KPK menjadi ruang untuk memberikan klarifikasi atas temuan-temuan penyidik dalam kasus korupsi e-KTP. "Tidak perlu takut sampaikan apa adanya dan ini supaya enak dipandang masyarakat," kata anggota Komisi II DPR itu.

Yandri pun menilai tak ada hubungan antara pemeriksaan KPK dan uji materi Undang-Undang KPK di MK yang diajukan Setnov. Sebab, keduanya adalah proses hukum yang berbeda. "Jadi tidak bisa satu lembaga menyandera lembaga lain," katanya. Yandri meminta Setnov memberikan contoh kepada masyarakat dalam menjalankan proses hukum. "Tidak perlu banyak alasan," tandasnya. Ia pun menyarankan agar KPK mela-

kukan jemput paksa Setnov jika mangkir kembali. "Kalau enggak datang panggil paksa saja," imbuah Yandri.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eddy Kusuma Wijaya mengamini. "Kalau itu keputusan pribadi beliau (Setnov, red), yang penting kalau kita semuanya harus patuh hukum karena hukum kita buat bersama harusnya kita patuhi bersama," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (15/11).

Sementara Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menyatakan, Novanto dinilai sebagai Ketua DPR terburuk selama era reformasi. "Iyalah, selama era reformasi, Ketua DPRnya pertama Harmoko, lalu Akbar Tandjung, Agung Laksono, Marzuki Alie, sekarang Setya Novanto, iya yang terburuk ki-

ra-kira dari kasus kriminal," ujar Mahfud kepada wartawan di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Pakar hukum tata negara itu meminta Novanto berani menjalani proses hukum. "Buktikan saja di pengadilan nanti jika merasa tidak bersalah," tukasnya.

Kendati demikian, Mahfud yakin KPK tidak sembarangan menetapkan Ketua Umum Partai Golkar itu sebagai tersangka. Bukti-bukti, sudah lebih dari cukup. "Bukti petunjuknya banyak sekali dan sering muncul di pengadilan. Kasus ini berjalan, dalam setiap pemeriksaan selalu hampir semua menyebut ada Novanto di situ," bebernya.

Mahfud MD mengingatkan, Novanto tidak lari dari hukum. Apalagi, tidak akan sulit bagi Polri menangkap Novanto jika memang diperlukan. (aen)